

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 yang ditegaskan kembali dalam UU No. 45/2009 setelah direvisi, pengelolaan perikanan merupakan kewajiban. Dalam konteks adopsi hukum ini, pengelolaan perikanan didefinisikan sebagai semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya ikan, serta pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan pemerintah atau otoritas lain. Dirancang untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang disepakati.

Menurut Charles (2001) secara alamiah, pengelolaan perikanan tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi yang tidak terpisahkan satu sama lain yaitu (1) dimensi Sumber daya perikanan dan ekosistemnya; (2) dimensi pemanfaatan Sumber daya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat; dan (3) dimensi kebijakan perikanan itu sendiri. Terkait dengan ketiga dimensi tersebut, pengelolaan perikanan saat ini tidak mempertimbangkan keseimbangan 3 dimensi tersebut, dan meyakini bahwa pemanfaatan lebih penting bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat daripada, misalnya, kesehatan ekosistem. Atau dengan kata lain, pendekatan yang dilakukan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi ke dalam kerangka dinamika ekosistem yang menjadi wadah dari sumber daya ikan sebagai sasaran pengelolaan. Dalam hal ini, pendekatan terintegrasi melalui pendekatan ekosistem terhadap pengelolaan perikanan (*ecosystem approach to fisheries management*, yang selanjutnya disingkat EAFM) menjadi sangat penting.

Metode pengelolaan perikanan ini mengembangkan konsep keseimbangan tujuan sosial ekonomi pengelolaan perikanan (kesejahteraan nelayan, keadilan pemanfaatan sumber daya ikan, dan lainnya) dengan tetap mempertimbangkan informasi, pengetahuan, dan ketidakpastian tentang komponen biotik, abiotik dan interaksi manusia dalam ekosistem perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan (Direktorat SDI-KKP, WWF

Indonesia dan PKSPPL-IPB, 2011).

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan (EAFM) antara lain adalah : (1) perikanan harus dikelola pada batas yang memberikan dampak yang dapat ditoleransi oleh ekosistem; (2) interaksi ekologis antar Sumber daya ikan dan ekosistemnya harus dijaga; (3) perangkat pengelolaan sebaiknya *compatible* untuk semua distribusi Sumber daya ikan; (4) prinsip kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan perikanan; (5) tata kelola perikanan mencakup kepentingan sistem ekologi dan sistem manusia (FAO, 2003).

Pelaksanaan EAFM dalam pendekatan ekosistem dan pengelolaan perikanan memiliki 6 domain yang dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi tentang sejauh mana pengelolaan perikanan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis ekosistem. Indikator EAFM termasuk dalam 6 domain, (1) Sumber daya ikan; (2) habitat dan ekosistem; (3) teknik penangkapan ikan; (4) ekonomi; (5) sosial; (6) kelembagaan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang merupakan pelabuhan perikanan tipe B (Pelabuhan Perikanan Nusantara/PPN). PPN Palabuhanratu merupakan tempat pendaratan ikan semar (*Mene maculata*) di pesisir selatan Jawa. Hal ini karena letaknya yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan adanya teluk yang merupakan salah satu habitat ikan semar.

Ikan semar merupakan salah satu ikan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Pada tahun 2015-2017, penangkapan ikan semar mencapai 573,44 ton dimana 70,90% dikonsumsi secara domestik dan sisanya diekspor ke Malaysia, Mauritius, Jepang, Taiwan dan USA (BKIPM 2017).

Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian yang berjudul “Keberlanjutan Pengelolaan Perikanan Semar (*Mene maculata*) di PPN Palabuhanratu Ditinjau Dari Aspek Sumber Daya Ikan”. Domain yang menjadi fokus kajian adalah domain sumber daya ikan. Adapun indikator yang digunakan di domain sumber daya ikan (SDI) yaitu (Direktorat Sumber daya Ikan Kementerian Kelautan Perikanan): kapasitas penangkapan, selektivitas alat tangkap, metode penangkapan ikan yang merusak dan/atau illegal, kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal, modifikasi alat

tangkap ikan dan alat bantu penangkapan, serta mensertifikasi ABK sesuai dengan domain sumber daya ikan yang dipilih karena ini merupakan domain penting yang mempengaruhi terhadap produktivitas perikanan dan ekosistem untuk mencegah penangkapan ikan yang berlebihan, yang dapat mengurangi produksi ikan semar.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah terhadap penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana kondisi perikanan semar di PPN Palabuhanratu?
- 2) Bagaimana keberlanjutan pengelolaan perikanan semar di PPN Palabuhanratu telah menerapkan prinsip EAFM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis hasil tangkapan ikan semar yang di daratkan di PPN Palabuhanratu.
- 2) Menilai keberlanjutan pengelolaan perikanan semar di PPN Palabuhanratu menggunakan CPUE pada domain Sumber Daya Ikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

- 1) Menjadi perbandingan dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- 2) Dapat bermanfaat bagi *stakeholder* khususnya pengelola PPN Palabuhanratu pada Sumber Daya Ikan dalam pengelolaan perikanan berpendekatan ekosistem.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini adalah :

- 1) Penelitian ini difokuskan untuk perikanan semar di PPN Palabuhanratu.
- 2) Penelitian ini dibatasi pada domain Sumber Daya Ikan EAFM pada pengelolaan Ikan semar